

## **Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang**

**Irmawati Tangko, Syaikhul Falah, Bill J. C. Pangayow**

[irmawatitangko31@gmail.com](mailto:irmawatitangko31@gmail.com) [sehufallah@gmail.com](mailto:sehufallah@gmail.com) [billpangayow@gmail.com](mailto:billpangayow@gmail.com)

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih*

### **ABSTRACT**

*The objectives to be achieved by the authors of this study are: 1) To examine the effect of the local government accounting system on the quality of financial reports of Pegunungan Bintang District government, 2) To examine the effect of human resource competencies on the quality of the Gunung Bintang regency financial statements, 3 ) To examine the effect of technology utilization on the quality of financial statements of the Pegunungan Bintang District government, and 4) To examine the effect of government accounting systems, human resources and the use of information technology on the financial reporting quality of the Pegunungan Bintang District government.*

*This study uses data collection techniques with questionnaires distributed to respondents. The data analysis method used in this study used multiple linear regression analysis.*

*The results showed that the t-test statistics on the government accounting system (SAP) were 2,776 with a significance level of 0,007. The statistical value of the tcount test is smaller than t table ( $2.776 > 1.667$ ) with a significantly smaller than  $\alpha = 0.05$ . Human resources (HR) obtained t test statistics of 2.662 with a significance level of 0.010. The statistical value of the tcount test is greater than t table ( $2.662 > 1.667$ ) and also significantly smaller than  $\alpha = 0.05$ . The utilization of information technology (PTI) obtained t test statistics of 2.754 with a significance level of 0.008. The statistic value of the tcount test is greater than t table ( $2.754 > 1.667$ ) and also significantly smaller than  $\alpha = 0.05$ . The F value of the table at the significance level of 5% ( $\alpha = 0.05$ ), numerator 3 and denominator 66 is equal to 4.896. The calculated F value based on the results of computer calculations is 37,176. When comparing the F count and F table values, it is known that the calculated F value is greater than the F table value ( $37,176 > 4,896$ ), so that it can be said that the government accounting system, human resources and the use of information technology simultaneously have a significant effect on report quality regional finance.*

**Keywords:** *Local Government Accounting System (SAP), Competence of Human Resources (HR), Information Technology Utilization (PTI), Quality of Local Government Financial Reports.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Penggunaan anggaran keuangan pemerintah daerah harus dapat memenuhi syarat-syarat transparansi dan akuntabilitas, sehingga penyusunan pelaporan penggunaan anggaran pemerintah daerah tepat waktu dan memenuhi kualitas standar pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini bisa tercapai apabila didukung oleh penerapan standar akuntansi yang baik, berjalannya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik serta tersedianya sumber daya manusia yang tangguh. Fungsi pokok laporan keuangan daerah yang sangat vital adalah merupakan gambaran kondisi kemajuan suatu pemerintahan daerah dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan good government. Hal ini dapat diwujudkan kedalam bentuk penyajian laporan keuangan yang baik dan telah diaudit secara profesional.

Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diketahui bahwa ada banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami (Mahmudi, 2016).

Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam proses evaluasi dan pengambilan kebijakan sosial, politik, kualitas laporan keuangan pemerintah, dan ekonomi yang lebih berkualitas (Mahmudi, 2016). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat diketahui berdasarkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan yang berupa opini tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian selanjutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan *discleamer* atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Kualitas LKPD berdasarkan pada tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu adanya sistem akuntansi pemerintah daerah, tersedianya sumber daya manusia dan adanya pemanfaatan teknologi. Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2016) menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, karena apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan kemampuan baik dalam tingkat individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangnya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (GTZ dan USAID/CLEAN Urban, 2001 dalam Indriasari dkk, 2008). Hullah dkk (2012) menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain sumber daya manusia hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah teknologi informasi. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan

informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat potensi pemanfaatannya secara luas, dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang direvisi Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang menerapkan aplikasi SIMDA baru pada tahun 2018 dalam penyajian laporan keuangannya, dimana sistem informasi yang digunakan Sebelumnya adalah: aplikasi SIMAKDA dan SIADINDA. Hasil penerapan SIMAKDA DAN SIADINDA ini tidak memberikan perubahan dalam opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dimana pada tahun 2011 mendapat Opini Tidak Wajar (TW) dan mulai tahun 2012 sampai dengan 2017 mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan demikian Kabupaten Pegunungan Bintang belum pernah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya. Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang telah menerapkan Aplikasi SIMDA diharapkan dalam pengelolaan keuangannya dapat mengalami perubahan yang berarti karena dalam mencapai kualitas laporan keuangannya dari sisi Opini BPK. Hal ini dikarenakan bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiwin Windasari (2017) yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kabupaten Subang)". Penulisan menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat variabel yang diteliti: variabel independen (bebas) yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dan untuk variabel dependen (terikat) adalah kualitas laporan keuangan daerah. Peneliti melakukan penelitian pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) kabupaten Pegunungan Bintang melalui perangkat kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dinas dengan unit analisis SDM/pegawai sub bagian keuangan/akuntansi di setiap dinas.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan diangkat untuk dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang?, 2) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang?, 3) Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang?, 4) Apakah sistem akuntansi pemerintah, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang?

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, 2) Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, 3) Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, 4) Untuk menguji pengaruh sistem akuntansi pemerintah, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori TAM (*Technology Acceptance Model*)

*Technology acceptance Model* (TAM) adalah salah satu model yang dibangun untuk menganalisa dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. Teori ini dikemukakan oleh Davis (1986) dan kemudian dipakai serta dikembangkan kembali oleh beberapa peneliti seperti Adam et al. (1992) Szajna (1994), Igbaria et al. (1995) dan Venkatesh dan Davis (2000) dan Sanjaya (2005). TAM merupakan hasil pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang lebih dahulu dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein, 1980 dalam Sanjaya, 2005. *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang lebih dahulu dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein, 1980, dalam Sanjaya (2005). *Theory of Reasoned Action* (TRA) adalah suatu model khusus yang telah terbukti berhasil untuk memprediksi dan menjelaskan tentang perilaku seseorang dalam memanfaatkan dengan beraneka ragam bidang. TRA juga dapat di jelaskan sebagai sebuah model yang mempelajari secara luas psikologi sosial berkaitan dengan perilaku seseorang yang dilakukan secara sadar (Fishbein dan Ajzen, 1975 dalam Sanjaya, 2005). Dalam TRA dijelaskan bahwa perilaku merupakan seperangkat perbuatan dan tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini minat berperilaku adalah penggunaan suatu teknologi informasi.

Menurut Vankatesh & Morris (2000) dalam Sanjaya (2005), TAM digunakan untuk melihat pemahaman individual yang secara terus menerus menggunakan teknologi informasi dalam aktifitasnya. Penggunaan sistem informasi pada individu melakukan aktifitas dan pemanfaatannya masih menjadi perhatian penting bagi peneliti, walaupun terdapat kemajuan yang cukup berarti dalam kemampuan *Hardware* dan *Software*. Tingginya penggunaan suatu sistem informasi menandakan bermanfaat mudahnya suatu sistem informasi. Seseorang akan memanfaatkan sistem informasi dengan alasan bahwa sistem tersebut akan menghasilkan manfaat bagi dirinya.

### Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi dasar sumber daya manusia adalah kemampuan dan kecakapan seorang pegawai dimana keterampilan dan kemampuannya sangat baik yang mampu melakukan pekerjaannya sehingga tercapai apa yang menjadi targetnya. menurut McClelland dalam Rivai (2011) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang, yang berpengaruh langsung untuk mencapai target kinerja dengan menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*) yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi baik akan dapat menjalankan sebuah rangkaian laporan keuangan dengan baik pula, hal ini sangat berhubungan dengan kompetensi individu seorang pegawai dan sangat berhubungan dengan kinerja instansi. Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, seperti berfikir konseptual dan berfikir analitis. Perbedaan kemampuan berfikir konseptual dan berfikir analitis antara satu sama lain akan membedakan kompetensi seseorang dalam pengambilan keputusan, kompetensi perencanaan, dan lain sebagainya. Dari faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kompetensi tersebut, ada faktor determinan yang dapat dengan mudah diubah dan ada faktor determinan yang sulit diubah.

### Pemanfaatan Teknologi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu sarana atau alat yang digunakan untuk *mengumpulkan data*, termasuk memproses, menyusun, menyimpan, mengolah data dalam berbagai cara melalui aplikasi (*soft were*) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, informasi tersebut haruslah memenuhi syarat sebuah laporan yaitu relevan, akurat dan tepat waktu, mudah dipahami serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, mampu menampilkan dan memberi informasi yang strategis dalam upaya pengambilan keputusan.

Teknologi informasi yang digunakan haruslah memenuhi syarat-syarat yang baik sebuah teknologi informasi, baik dari perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu

yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan dari sebuah proses laporan keuangan yang cepat dan akurat. Penggunaan teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi itu sendiri, dengan selalu melakukan *up date* tentang teknologi informasi yang terkini.

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat baik buruknya suatu laporan keuangan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar. Dalam menyusun suatu laporan keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode harus menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan. Untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam laporan keuangan terutama untuk operasional pemerintah, menilai kondisi ekonomi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu ketaatannya terhadap undang-undang.

### **Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah juga mengharapkan bagaimana proses akuntansi itu dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan sistematika sistem akuntansi keuangan daerah sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut relevan, dapat diandalkan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2017) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan standar akuntansi dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah provinsi DIY. Penelitian Putriasri Pujanira menggunakan teknik Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi DIY. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Ketika sejak awal Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan diatas dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.**

#### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sejalan dengan otonomi pemerintahan daerah tuntutan masyarakat kepada pemerintahan daerah semakin meningkat. Pemerintahan harus dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai salah satu tanggung jawab *good governance* pemerintah harus menyediakan informasi bagi penyedia dana dan pemakai lain. Guna memenuhi tanggung jawab ini dibutuhkan sumber daya manusia dalam penyusunannya. Sumber daya manusia akan berperan aktif dalam proses pelaporan informasi keuangan dari proses awal hingga akhir sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2017) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan standar akuntansi dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah provinsi DIY. Penelitian Putriasri Pujanira menggunakan teknik Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi DIY. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Artinya bahwa semakin kompeten SDM pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan diatas dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

## **H2 : Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.**

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu sarana atau alat yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dimana informasi tersebut haruslah memenuhi syarat yaitu relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, yang mampu menampilkan dan memberikan informasi yang strategis dalam upaya pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2018) yang berjudul pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Bandung. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Artinya bahwa kemampuan dalam sistem pengelolaan data yang berupa program-program untuk mengontrol kerja sistem komputer dan mengidentifikasi program komputer, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan diatas dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

### **H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.**

#### **Hipotesis Penelitian**

Model penelitian Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

- H1 : Sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H2 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- H4 : Sistem akuntansi pemerintah daerah, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampelnya pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan” Sugiono (2016).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer melalui kuisioner. Data primer adalah ”sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data” Sugiono (2016). Sedangkan menurut Sunyoto (2013), mendefinisikan data primer adalah sebagai berikut: “Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.”

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada Badan dan Dinas Kabupaten Pegunungan Bintang.

## Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan yang berada pada semua OPD di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 25 OPD. Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini sampel yang diambil berdasarkan metode purposif sampling adalah cara menentukan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiono 2016). Dimana setiap OPD di ambil sebanyak 3 orang yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yaitu Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Staf Keuangan. Jadi total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 sampel.

## Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Metode angket atau kuesioner, menurut Sugiyono (2011), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis angket dalam penelitian ini yaitu angket tertutup, di mana responden hanya memberi jawaban sesuai dengan apa yang sudah disediakan oleh peneliti, alternatif jawaban sudah tersedia. Kuesioner yang disebarkan berupa daftar pernyataan terkait dengan objek yang diteliti, disertai dengan surat permohonan izin dan penjelasan mengenai tujuan dari penelitian yang dilakukan ini. Selain itu, dalam penyebaran kuesioner juga disertakan petunjuk pengisian yang jelas, untuk memudahkan responden dalam melakukan pengisian dan memberikan jawaban secara lengkap.

## Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono 2011). Variabel yang akan di uji dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel dependen yang diberi simbol Y dan variabel independen diberi simbol X. Menurut Sugiyono (2011) variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas sedangkan variabel independen (variabel bebas) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen (Y) adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan variabel independennya adalah sistem akuntansi keuangan daerah (SAP), sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi (PTI).

## Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian sistem akuntansi pemerintah daerah  
Suatu proses pengumpulan data, pencatatan dan pelaporan keuangan yang saling berhubungan sehingga dapat menghasilkan informasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
2. Pengertian Kompetensi sumber daya manusia  
Merupakan kemampuan dasar bagi setiap pegawai yang bekerja pada bagian keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi masing-masing sesuai dengan tupoksi berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengertian pemanfaatan teknologi informasi  
Teknologi informasi adalah media atau sarana yang digunakan untuk terlaksananya sebuah pekerjaan dengan hasil yang lebih optimal, teknologi informasi mencakup tentang *hardware* dan *software*. Sehubungan dengan pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kecepatan penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan aturan-aturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini akan sangat erat hubungannya mengenai syarat

sebuah laporan keuangan yaitu kesesuaian, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah dipahami. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebuah produk dari serangkaian proses pembuatan laporan keuangan yang erat kaitannya dengan pegawai yang melaporkan, teknologi yang digunakan, dan sistem laporan keuangan pemerintah daerah.

### Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun model regresi Linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD)  $B_0$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

$X_2$  = Sumber Daya Manusia (SDM)

$X_3$  = Pemanfaatan Teknologi Informasi

(PTI)  $e$  = eror

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji-t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Bentuk pengujian adalah :

$H_0$  :  $\beta_1=0$ , artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a$  :  $\beta_2 \neq 0$ , artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

Apabila probabilitas  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_a$  diterima

Apabila probabilitas  $> \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

#### Uji signifikansi (Uji-F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel-variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

$H_0$  :  $\beta_1=\beta_2=0$ , artinya secara simultan (bersama-sama) variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a$  :  $\beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ , artinya secara bersama-sama (serentak) variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dengan kriteria:

$H_0$  diterima, apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5 \%$

$H_a$  diterima, apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5 \%$ .

#### Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )

Koefisiensi determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model persamaan regresi (independent variables) dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisiensi determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabelvariabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian. Tabel statistik deskriptif menunjukkan angka kisaran teoritis dan sesungguhnya, rata-rata

dan standar deviasi. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan statistik deskriptif sejumlah 70 responden.

**Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
SAP	70	14.00	26.00	40.00	32.8571	.38785	3.24500
SDM	70	19.00	16.00	35.00	28.3143	.50894	4.25813
PTI	70	11.00	19.00	30.00	23.8857	.29875	2.49952
LKPD	70	14.00	26.00	40.00	33.2000	.42422	3.54924
Valid N (listwise)	70						

Sumber : Data diolah SPSS, 2019

Hasil analisis deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) mempunyai nilai standar error yang paling dominan yaitu sebesar 0,50894, nilai kisaran teoritis minimum sebesar 16.00 sampai dengan 35.00 dengan nilai rata-rata sebesar 28.3143 dan standar deviasi sebesar 4.25813. Artinya bahwa, Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan yang paling dominan atau penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin baik pula. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang masih menggunakan konsultan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan pelatihan dan pendidikan berupa laporan keuangan pemerintah daerah agar ke depan pemerintah dapat mandiri dalam menyusun laporan keuangan.

## Uji Hipotesis

### Analisis Linear Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem akuntansi pemerintah (SAP), sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi (PTI) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (LKPD). Ringkasan hasil analisis regresi dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Ringkasan Hasil Analisis Regresi**

Variabel	Koefisiensi B	t <sub>hitung</sub>	Signifikan	Keterangan
SAP	0,338	2.776	0.007	Signifikan
SDM	0,290	2.662	0.010	Signifikan
PTI	0,278	2.754	0.008	Signifikan
$\alpha$		= 0,05		
R		= 0,793		
Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )		= 0,628		
F-Hitung		= 37,176		
Signifikan		= 0,000		
t <sub>tabel</sub>		= 1,667		

Sumber : Data diolah SPSS, 2019

Hasil regresi yang didapatkan berdasarkan tabel 2 adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,338X_1 + 0,290X_2 + 0,278X_3 + e$$

Dimana :

- Y : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
 (LKPD) X<sub>1</sub> : Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)  
 X<sub>2</sub> : Sumber Daya Manusia (SDM)  
 X<sub>3</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisiensi determinasi digunakan untuk menguji *goodnes-fit* dan model regresi. Dalam penelitian ini uji koefisiensi determinan digunakan untuk melihat berapa besar variabel independent mampu menjelaskan variabel dependent. Dengan kata lain koefisiensi determinan digunakan untuk mengukur kemampuan variabel sistem akuntansi pemerintah (SAP), sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi (PTI) dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah (LKPD).

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.793 <sup>a</sup>	.628	.611	2.21272	2.188

a. Predictors: (Constant), PTI, SDM, SAP

b. Dependent Variable: LKPD

Sumber : Data diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui besarnya koefisiensi korelasi ( $R^2$ ) sebesar 0,611 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara variabel sistem akuntansi pemerintah (SAP), sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi (PTI) sebesar 61,1% berada pada kategori cukup. Artinya bahwa, variabel independen (sistem akuntansi pemerintah, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi) mampu menjelaskan variabel dependen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebesar 61,1% dan selebihnya sebesar 38,9% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti komitmen organisasi, budaya organisasi dan sistem pengendalian intern.

### Uji Simultan (Uji F)

Uji-F ini digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh secara simultan antara sistem akuntansi pemerintah, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

**Tabel 4. ANOVA(b)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	546.056	3	182.019	37.176	.000 <sup>a</sup>
Residual	323.144	66	4.896		
Total	869.200	69			

a. Predictors: (Constant), PTI, SDM, SAP

b. Dependent Variable: LKPD

Sumber : Data diolah SPSS, 2019

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ), sedangkan nilai derajat bebas (*degree of freedom = df*) numerator 3 dan denominator adalah 66. Nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), numerator 3 dan denominator 66 adalah sebesar 4,896. Nilai F hitung berdasarkan hasil perhitungan komputer adalah sebesar 37,176. Apabila membandingkan nilai F hitung dan nilai F tabel, diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar

dari nilai F tabel ( $37,176 > 4,896$ ), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sistem akuntansi pemerintah, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### Uji Parsial (Uji t)

Uji signifikan parameter individual (uji statistik t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini bisa dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Apabila *p-value*  $< 0,05$  maka hipotesis diterima dan apabila *p-value*  $> 0,05$  maka hipotesis tidak terdukung (Ghozali, 2005).

Pengujian model regresi digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen pembentuk model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah variabel sistem akuntansi pemerintah (SAP), sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi (PTI) mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah (LKPD). Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji t, yakni dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Variabel independent pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau tingkat signifikan  $< \alpha = 0,05$ . Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.5.

**Tabel 5. Hasil Uji Parameter Individual (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	4.790	2.920		1.641	.106
SAP	.369	.133	.338	2.776	.007
SDM	.242	.091	.290	2.662	.010
PTI	.395	.143	.278	2.754	.008

a. Dependent Variable: LKPD

Sumber : Data diolah SPSS, 2019

Dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 21.00, didapatkan statistik uji t terhadap sistem akuntansi pemerintah (SAP) sebesar 2,776 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007. Nilai statistik uji  $t_{hitung}$  tersebut lebih kecil daripada  $t_{tabel}$  ( $2,776 > 1,667$ ) dengan signifikan lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pada variabel sumber daya manusia (SDM) didapatkan statistik uji t sebesar 2,662 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,010. Nilai statistik uji  $t_{hitung}$  tersebut lebih besar daripada  $t_{tabel}$  ( $2,662 > 1,667$ ) dan juga signifikan lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pada variabel pemanfaatan teknologi informasi (PTI) didapatkan statistik uji t sebesar 2,754 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008. Nilai statistik uji  $t_{hitung}$  tersebut lebih besar daripada  $t_{tabel}$  ( $2,754 > 1,667$ ) dan juga signifikan lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hal ini karena pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam hal pelaporan keuangan menggunakan konsultan, sehingga kualitas pelaporan yang dihasilkan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh yang baik.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Sehingga itu agar laporan keuangan yang disajikan berkualitas sangat diperlukan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. maka dengan adanya diterapkannya standar akuntansi pemerintah dalam penyajian laporan keuangan, maka otomatis laporan keuangan yang disajikan juga akan lebih berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, mengakui suatu aset sebagai aset tetap jika dikuasai dan dimilikinya, dengan memperhatikan keberwujudan aset dimaksud, manfaat ekonomik yang dapat diperoleh, masa manfaatnya yang lebih dari 12 (dua belas) bulan, serta biaya perolehannya dapat diukur dengan andal, dan diperoleh untuk digunakan dalam operasionalisasi pemerintahan. Sebagaimana diatur oleh PP 71/2010. Setelah proses pengukuran, aset tetap Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya, sesuai dengan SAP

PP 71/2010, terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Klasifikasi aset tetap ini disajikan dalam Neraca dan LBMD.

Standar Akuntansi Pemerintahan sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Pemerintah daerah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai mendorong reabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, konsistensi dalam pelaporan keuangan. Semakin banyak jumlah pelanggaran terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan, semakin menurunkan opini audit di mana dalam hal ini semakin kecil kemungkinan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menerima opini WTP. Standar Akuntansi Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kesesuaian standar tersebut mendorong pengaruh dalam memberikan opini.

### **Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan dari data yang diperoleh, tingkat pendidikan pegawai OPD Kabupaten Pegunungan khususnya sub bagian keuangan rata-rata memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 44 pegawai dari 70 pegawai. Dengan tingkat pendidikan tersebut pegawai sub bagian keuangan sudah dirasa cukup memadai untuk menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan dengan bekal yang telah dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hasil ini sesuai dengan penelitian Asri (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Apabila PPK-OPD dalam melaksanakan tugasnya menggunakan keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya dengan baik serta didukung dengan perilaku yang mengutamakan kode etik, maka pengendalian intern cenderung akan berjalan dengan efektif. Penerapan sistem pengendalian pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami dan menguasai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah dengan baik.

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dari basis kas menjadi basis akrual

mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang memberdayakan pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan yang handal hanya dapat dilakukan oleh pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan juga akan semakin baik dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (PRI) berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hasil ini sejalan dengan penelitian Firdaus (2018), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. PP No. 56 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah.

PP No. 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat serta diselenggarakan secara efektif. Oleh karena itu, pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya kasus kelemahan sistem pengendalian intern diantaranya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait dengan kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dapat mengurangi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan karena dengan pemanfaatan teknologi informasi maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disajikan tepat waktu serta adanya sistem informasi akuntansi yang memadai untuk mengolah data transaksi keuangan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan pada OPD Kabupaten Pegunungan Bintang masih mengalami kendala, salah satu kendala yang dihadapi adalah terbatasnya jaringan internet yang digunakan untuk mengakses dan menginput laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Pegunungan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet guna mengefektifkan sistem informasi yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hal ini karena pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam hal pelaporan keuangan menggunakan konsultan, sehingga kualitas pelaporan yang dihasilkan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh yang baik.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil analisis menunjukkan bahwa, standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Standar akuntansi pemerintah merupakan standar yang digunakan dalam hal pelaporan keuangan daerah, dengan meningkatnya penerapan standar akuntansi pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang maka laporan keuangan yang dibuat akan semakin berkualitas. Sebaliknya apabila laporan standar akuntansi pemerintah tidak diterapkan maka laporan keuangan yang disajikan kurang berkualitas.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh OPD Kabupaten Pegunungan Bintang rata-rata berpendidikan sarjana (S1). Dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa SDM sangat berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas di dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. SDM yang terlibat dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dituntut untuk memiliki kompetensi yaitu suatu keahlian dan pengetahuan yang baik untuk dapat menyelesaikan tugas.

Pemanfaatan teknologi informasi yang ada pada OPD Kabupaten Pegunungan Bintang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya pemanfaatan terhadap teknologi informasi yang baik, maka kualitas laporan keuangan daerah dapat diakses dan dipublikasikan secara online, sehingga masyarakat dapat melihat langsung laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang melalui website yang diakses secara langsung.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah, dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintah dalam penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan juga akan semakin berkualitas.
2. Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Artinya, semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka, laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi dalam proses akuntansi khususnya dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah akan berdampak baik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.
4. Sistem akuntansi pemerintah, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Artinya bahwa, jika standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
2. Peneliti menggunakan 3 orang responden pada bagian keuangan di setiap OPD Kabupaten Pegunungan Bintang.
3. Hasil penelitian menunjukkan masih ada variabel lain seperti komitmen organisasi, budaya organisasi dan sistem pengendalian intern yang mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

## Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis merumuskan saran sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang masih terbatas, hal ini karena kurangnya akses jaringan internet yang dapat digunakan oleh OPD dalam menginput laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dapat meningkatkan kapasitas jaringan internet yang ada, sehingga pemanfaatan teknologi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.
2. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang belum sesuai dengan harapan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang diharapkan dapat mengevaluasi laporan keuangan dan memberikan pelatihan/pendidikan kepada pegawai dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam menyusun laporan keuangan daerah masih menggunakan konsultan, dengan demikian perlu adanya transfer ilmu yang dilakukan oleh konsultan kepada pegawai khususnya bagian keuangan agar pegawai dapat menyusun laporan keuangan daerah secara mandiri tanpa harus bergantung kepada konsultan.
4. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan korelasi sebesar 61,1%, masih ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, oleh sebab itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel penelitian dengan menambahkan variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti komitmen organisasi, budaya organisasi dan sistem pengendalian intern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2014. Akuntansi, Transportasi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Abdulkadir dan Terra CH. Triwahyuni. 2014. Pengenalan Teknologi Informasi. Andi. Yogyakarta.
- Erlina Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Medan : Brama Ardian.
- FirelaFirdaus Wahyu Lasuardi, 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Badan dan Dinas Kota Bandung). <http://respository.unpas.ac.id>.
- Harahap, Sofyan syafri. 2013. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan edisi 11. Rajawali Pers, Jakarta.
- Jogiyanto. 2009. Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta. Andi Offset.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri RI Nomor 46A Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai negeri Sipil.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, edisi ketiga. Yogyakarta:UUP STIM YKPN.
- Mulyadi. 2007. Sistem Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.
- Pujanira Putriasri, 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY. <http://jurnal.uny.ac.id>.
- Pramono Hariadi, dkk. 2010. Pengelolakan Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Rivai, Veithzal. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta : Rajawali Pers.108.
- Sigiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sudarmayanti. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil edisi Revisi. Bandung : PT Reflika Aditama.
- Sudarmanto. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sunyoto. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
- Sutarman. 2012. Buku Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2016. Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM, edisi ketiga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja, edisi tiga. Jakarta : Rajawali Pers.
- Windsari Wiwin, 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang). <http://respository.inpas.as.id>.

